



9 772088 235001

KONSOLIDASI FISKAL 2025 DAN DAMPAKNYA TERHADAP STABILITAS EKONOMI INDONESIA

Edmira Rivani*

Abstrak

Kebijakan fiskal Indonesia tahun 2025 disusun dalam rangka menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan akselerasi pertumbuhan di tengah tekanan global. Pemerintah menetapkan defisit APBN sebesar Rp371,5 triliun atau 1,8% terhadap PDB, dengan orientasi pada efisiensi belanja dan peningkatan pengeluaran produktif. Pendekatan yang disebut "fiskal akrobatik" oleh Menteri Keuangan, merefleksikan strategi dinamis pemerintah dalam mengelola ruang fiskal yang terbatas untuk menyalakan mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Tulisan ini bertujuan menganalisis kebijakan fiskal 2025 dan dampaknya terhadap stabilitas makroekonomi serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya dalam menghadapi tantangan implementasi di tengah ketidakpastian global. Analisis menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas belanja, kecepatan realisasi anggaran, dan koordinasi lintas lembaga dalam menjaga momentum pertumbuhan serta daya beli masyarakat. Komisi XI DPR RI berperan strategis dalam memastikan kebijakan fiskal berjalan efektif dan akuntabel melalui fungsi anggaran dan pengawasan agar alokasi belanja negara tetap produktif serta mendukung stabilitas ekonomi nasional.

Pendahuluan

Fiskal merupakan salah satu instrumen utama dalam mengarahkan perekonomian menuju stabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan. Di tengah ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi global, kebijakan fiskal menjadi penopang penting dalam mempertahankan daya beli dan menjaga kesinambungan investasi publik. Tahun 2025 menjadi fase krusial bagi Indonesia karena merupakan masa konsolidasi pascapandemi Covid 19, ketika ruang fiskal mulai diperketat di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang tinggi.

Kementerian Keuangan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dengan proyeksi pendapatan negara sebesar Rp2.800 triliun dan belanja negara Rp3.171 triliun, sehingga menghasilkan defisit Rp371,5 triliun atau 1,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Grehenson, 2025). Pendekatan ini menandai arah konsolidasi fiskal yang berorientasi pada efisiensi, namun tetap menjaga kapasitas belanja untuk perlindungan sosial dan investasi produktif. Menteri Keuangan mengungkapkan kebijakan tersebut dikategorikan sebagai "fiskal akrobatik" karena menggabungkan disiplin fiskal dengan peran ekspansif belanja negara (Xasir, 2025).

*) Analis Legislatif Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. E-mail: edmira.rivani@dpr.go.id

Kondisi ekonomi global turut memperkuat urgensi kebijakan ini. Kenaikan harga energi, suku bunga global yang tinggi, serta ketidakpastian rantai pasok menimbulkan tekanan terhadap inflasi domestik dan nilai tukar. Sinergi kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter menjadi syarat mutlak untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Tulisan ini bertujuan menganalisis arah dan efektivitas kebijakan konsolidasi fiskal Indonesia tahun 2025 dalam menjaga stabilitas makroekonomi serta menopang pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global.

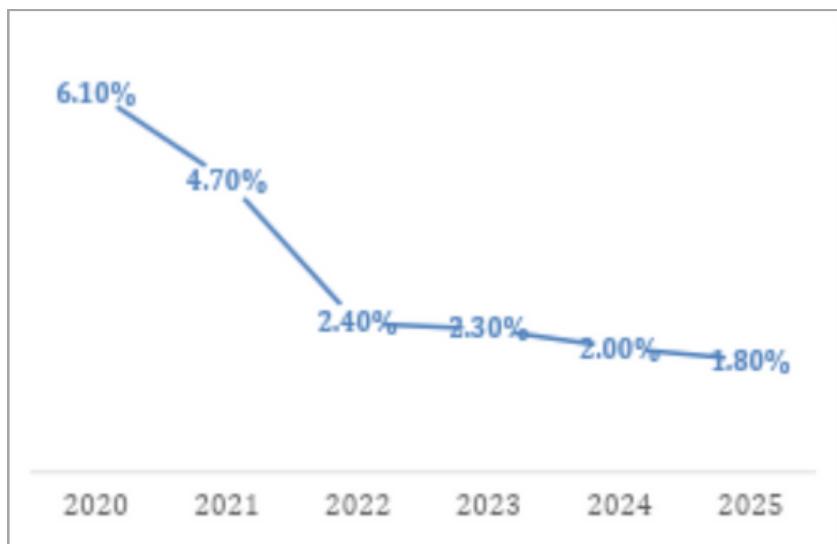
Kebijakan Fiskal 2025 dan Dampaknya terhadap Stabilitas Makroekonomi

Kebijakan fiskal tahun 2025 menitikberatkan pada efisiensi dan produktivitas belanja negara (Grehenson, 2025). Fokus utama diarahkan pada penguatan daya beli masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Pemerintah menekankan bahwa setiap rupiah belanja publik harus memberikan nilai tambah ekonomi yang terukur. Pendekatan berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) menjadi pijakan utama agar realisasi belanja benar-benar berdampak pada pertumbuhan dan pemerataaan.

Struktur kebijakan fiskal 2025 dirancang untuk mempertahankan defisit pada level moderat sambil memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi jangka menengah. Rencana pendapatan negara mengandalkan optimalisasi penerimaan pajak, kepabeanan, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Di sisi lain, pengeluaran negara diarahkan pada belanja produktif, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis (Kementerian Keuangan, 2025).

Kebijakan fiskal ini diharapkan menjaga stabilitas makroekonomi melalui tiga mekanisme utama. *Pertama*, dengan menstimulasi permintaan agregat melalui belanja sosial dan infrastruktur, kebijakan ini berfungsi sebagai bantalan terhadap perlambatan ekonomi global. *Kedua*, disiplin fiskal dengan defisit di bawah 2% memperkuat kredibilitas keuangan negara di mata investor, sehingga dapat menekan biaya pembiayaan utang. *Ketiga*, peningkatan efisiensi belanja diharapkan memperbaiki produktivitas ekonomi nasional.

Dalam konteks stabilitas makro, sinergi dengan kebijakan moneter menjadi faktor penentu keberhasilan. Bank Indonesia mempertahankan kebijakan suku bunga acuan yang moderat untuk menahan inflasi dan menjaga nilai tukar. Sementara itu, kebijakan fiskal diarahkan untuk menekan risiko stagflasi dengan menjaga konsumsi rumah tangga tetap stabil. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK, 2025) menegaskan bahwa keseimbangan antara kebijakan moneter dan fiskal menjadi kunci menjaga momentum pertumbuhan di tengah tekanan eksternal. Sebagai gambaran, berikut tren defisit APBN Indonesia selama lima tahun terakhir.



Sumber: Kementerian Keuangan, 2025.

Gambar 1. Tren Defisit APBN Indonesia 2020–2025 (% terhadap PDB)

Grafik pada gambar 1 memperlihatkan tren konsolidasi fiskal yang konsisten sejak pandemi Covid 19, menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengembalikan defisit ke level pra-pandemi tanpa mengganggu momentum pemulihan ekonomi. Stabilitas ini menjadi fondasi bagi kepercayaan pasar dan keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Efektivitas Kebijakan dan Tantangan Implementasi

Kebijakan fiskal 2025 mencerminkan strategi adaptif pemerintah dalam menjaga stabilitas makro dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah keterbatasan ruang fiskal. Pendekatan “fiskal akrobatik” menunjukkan kemampuan pemerintah menyeimbangkan antara disiplin anggaran dan kebutuhan stimulus ekonomi. Namun, efektivitasnya sangat ditentukan oleh pelaksanaan di lapangan, kualitas belanja, serta koordinasi lintas lembaga dan wilayah.

Untuk memperkuat daya dorong ekonomi, pemerintah perlu terus mengefisienkan pengeluaran, memperluas basis penerimaan pajak, dan memastikan kecepatan realisasi belanja produktif. Reformasi struktural dalam sistem anggaran dan peningkatan akuntabilitas publik menjadi prasyarat agar kebijakan fiskal tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Efektivitas kebijakan fiskal 2025 bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan belanja produktif serta memastikan koordinasi antarlembaga berjalan efektif. Meskipun defisit berada dalam batas aman, efektivitas anggaran tidak hanya diukur dari besarnya pengeluaran, melainkan dari dampak ekonomi dan sosial yang dihasilkan. Defisit sebesar Rp371,5 triliun dinilai masih berada dalam batas wajar selama dialokasikan untuk kegiatan produktif yang menciptakan nilai tambah ekonomi, seperti pendidikan, infrastruktur, dan riset (Grehenson, 2025).

Tantangan implementasi kebijakan fiskal antara lain berasal dari keterbatasan kapasitas birokrasi, ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi, serta ketergantungan pada penerimaan pajak yang sensitif terhadap siklus ekonomi. Belanja pemerintah pusat sering kali menghadapi keterlambatan penyerapan anggaran akibat prosedur administrasi yang kompleks. Kondisi ini menurunkan efektivitas stimulus fiskal, terutama pada semester pertama tahun berjalan. Pemerintah berupaya mempercepat reformasi sistem anggaran berbasis kinerja dengan memperkuat sistem monitoring dan evaluasi secara digital agar realisasi anggaran lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi (Kementerian Keuangan, 2025).

Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan transfer ke daerah menjadi faktor penting. Dana transfer yang mencapai Rp919 triliun dalam APBN 2025 diharapkan menjadi instrumen pemerataan ekonomi regional (Kementerian Keuangan, 2025). Oleh karena itu, penguatan kapasitas fiskal daerah melalui digitalisasi tata kelola, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan akuntabilitas menjadi agenda prioritas dalam reformasi fiskal nasional.

Dari sisi makroekonomi, risiko yang dihadapi adalah meningkatnya ketergantungan terhadap pemberian utang domestik apabila penerimaan pajak tidak memenuhi target. Meskipun rasio utang terhadap PDB masih di bawah 40% (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 2025), kewaspadaan terhadap beban bunga utang perlu dipertahankan. Strategi diversifikasi pembiayaan melalui penerbitan obligasi hijau dan sukuk tematik diharapkan dapat memperkuat kredibilitas pasar keuangan nasional.

Efektivitas kebijakan juga tidak terlepas dari faktor eksternal. Ketegangan geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta perubahan arah kebijakan moneter negara maju dapat menekan arus modal dan nilai tukar rupiah. Dalam kondisi demikian, konsistensi pemerintah dalam menjaga defisit dan efisiensi belanja menjadi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi. Sinergi kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter dan sektor keuangan tetap menjadi pilar utama dalam menghadapi ketidakpastian global.

Penutup

Kebijakan fiskal 2025 mencerminkan strategi adaptif pemerintah dalam menjaga stabilitas makro dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah keterbatasan ruang fiskal. Pendekatan “fiskal akrobatik” menunjukkan kemampuan pemerintah menyeimbangkan antara disiplin anggaran dan kebutuhan stimulus ekonomi. Namun, efektivitasnya sangat ditentukan oleh pelaksanaan di lapangan, kualitas belanja, serta koordinasi lintas lembaga dan wilayah.

Komisi XI DPR RI berperan penting dalam memastikan arah kebijakan fiskal berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan. Komisi XI juga perlu mengawal efektivitas realisasi APBN serta mendorong transparansi pengelolaan keuangan negara. Sinergi

antara Kementerian Keuangan dan Komisi XI menjadi faktor krusial dalam menjaga kredibilitas fiskal, terutama untuk menghindari pelebaran defisit dan memastikan alokasi anggaran tepat sasaran. Untuk stabilitas ekonomi, pemerintah perlu meningkatkan efisiensi pengeluaran, memperluas basis penerimaan pajak, dan memastikan kecepatan realisasi belanja produktif. Dengan demikian, reformasi struktural dalam sistem anggaran dan peningkatan akuntabilitas publik menjadi fondasi agar kebijakan fiskal tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Referensi

- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (2025). Posisi utang pemerintah. *djppr.kemenkeu.go.id*. <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/>
- Grehenson, Gusti. (2025, Oktober 31). Defisit APBN Rp 371,5 triliun, pakar UGM dorong efisiensi dan belanja produktif. *ugm.ac.id*. <https://ugm.ac.id/id/berita/defisit-apbn-rp-3715-triliun-pakar-ugm-dorong-efisiensi-dan-belanja-produktif/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Nota keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2025. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Komite Stabilitas Sistem Keuangan. (2025, April). *Laporan stabilitas sistem keuangan triwulan I 2025*. Jakarta: KSSK.
- Kumparan. (2025, Oktober 30). Kebijakan fiskal 2025: Menavigasi penguatan SDM di tengah tantangan global. *Kumparan.com*. <https://kumparan.com/sapraji-official/kebijakan-fiskal-2025-menavigasi-penguatan-sdm-di-tengah-tantangan-global-261VcUHSCiw>
- Xasir, Teuku Gandawan. (2025, November 2). Fiskal akrobatik Purbaya: Strategi baru menyalakan ekonomi Indonesia. RMOL.id. <https://rmol.id/amp/2025/11/02/685289/fiskal-akrobatik-purbaya-strategi-baru-menyalakan-ekonomi-indonesia>

